

BAB II TINJAUAN**PUSTAKA****2.1 Landasan Teori****2.1.1 Agency Theory**

Teori keagenan mencakup hubungan antara pihak-pihak dalam suatu perusahaan, yaitu prinsipal dan agen. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal, pemilik atau pemegang saham yang memberikan kekuasaan pada agen, manajemen perusahaan (Wardoyo et al., 2021). Hubungan kontrak kerja antara keduanya adalah tentang manajemen perusahaan dan agen diberi wewenang dari prinsipal untuk melakukan semua tugas yang terkandung dalam kontrak kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai pihak dalam perusahaan dan sebagai manajemen, agen lebih memahami situasi aktual dan berbagai informasi yang relevan dari perusahaan daripada prinsipal. Dalam teori keagenan, ada konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Konflik ini dapat diminimalisir melalui mekanisme pengawasan atau struktur kepemilikan perusahaan. Salah satu hal yang dapat meredam konflik adalah adanya tata kelola perusahaan yang baik. Prospek hubungan keagenan menggambarkan aturan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara manajer dan pemegang saham. Alni Rahmawati, (2019) mengemukakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara manajer (agen) dan pemegang saham (principal). Hubungan agensi terkadang dapat menyebabkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konfrontasi tersebut muncul karena manusia adalah makhluk ekonomi yang sifatnya fundamental dengan mengutamakan kepentingannya sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda, dan masing-masing ingin mencapai tujuan mereka.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sebuah mekanisme yang mendukung perusahaan dalam menerapkan dan mengembangkan pengungkapan kegiatan sosialnya guna mendapatkan pengakuan dan diterima oleh masyarakat sehingga terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Teori tersebut menyatakan bahwa kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimana perusahaan tersebut berada dan harus diinformasikan secara

terus-menerus kepada masyarakat. Ketika kegiatan perusahaan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku hal tersebut dapat menyebabkan tidak diterimanya oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kegagalan pemasahaan (Nurhayati et al, 2019).

Menurut Romli & Zaputra, (2021) memiliki pendapat bahwa legitimasi merupakan sesuatu yang masyarakat berikan kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan yang didapat dari masyarakat. Dengan begitu legitimasi dapat mendukung terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Juliana et al (2020) perusahaan akan memperoleh legitimasi ketika adanya kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, dengan begitu tidak ada tuntutan yang diterima perusahaan dari masyarakat. Ketika perusahaan tetap ingin mendapatkan legitimasi maka mereka harus mengkomunikasikan kegiatan lingkungan yang mereka lakukan dengan cara pengungkapan kegiatan lingkungan sosial (Probosari & Kawedar, 2019).

2.1.3 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan menunjukkan kondisi perusahaan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Oleh karena hal tersebut nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh investor dan calon investor. Nilai perusahaan dapat berbeda-beda karena setiap investor maupun calon investor mempunyai pandangan tersendiri dan banyak cara yang dapat digunakan untuk menghitung nilai perusahaan. Baik investor maupun calon investor sering mengaitkan nilai perusahaan dengan harga saham perusahaan. Harga saham dengan nilai perusahaan seperti memiliki hubungan yang searah karena jika harga saham tinggi maka nilai perusahaan tinggi begitu juga sebaliknya. Harga saham yang tinggi memberikan sinyal positif bagi investor dan calon investor mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa mendatang.

Nilai perusahaan merupakan sebuah nilai yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepentingan sebuah perusahaan dilihat dari sudut pandang beberapa pihak seperti para investor yang mengaitkan nilai sebuah perusahaan dari harga sahamnya. Memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan harga saham dan itu juga yang diinginkan pemilik perusahaan karena nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi (Astari et al, 2019).

Dalam penelitian ini nilai perusahaan akan diukur dengan menggunakan Price to Book Value (PBV). PBV merupakan rasio yang mencerminkan nilai perusahaan dan sebagai tolak ukur untuk pengambilan keputusan dengan earn membandingkan apakah harga pasar per lembar saham lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku per lembar saham (Sudjiman, 2022). Ketika harga pasar per lembar saham lebih tinggi dari nilai buku per lembar saham maka rasio PBV di atas satu, dengan begitu dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan mencerminkan nilai perusahaan tinggi. Berikut adalah rumus dari PBV:

$$PBV = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{jumlah Saham Beredar}}$$

2.1.4 Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran penting dalam suatu organisasi. Banyak organisasi baik besar maupun kecil telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial ini. Tanggung jawabsosial menurut Megawati (2023) adalah kesediaan untuk melihat bahwa sumber daya (manusia dan ekonomi) tersebut digunakan untuk tujuan sosial yang luas bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan perusahaan yang dibatasi secara sempit. Lebih lanjut menegaskan, bahwa alat-alat produksi harus digunakan sedemikian rupa sehingga produksi dan distribusi akan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan akan diungkapkan di laporan tahunan perusahaan.

Adapun menurut Triyono & Tjitrohartoko (2022) tanggung jawab sosial adalah sebagai tindakan yang tampaknya memajukan beberapa kebaikan sosial, diluar kepentingan perusahaan dan apa yang disyaratkan oleh hukum. Terkait dengan hukum, di Indonesia sendiri telah ditegaskan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 Butir 3 mengenai Perseroan Terbatas yakni "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Menurut Kara & rahayu (2023) tanggung jawab sosial adalah gagasan yang mencerminkan kewajiban sosial dan konsekuensi sosial dari kesuksesan bisnis atau secara empiris terdiri dari kebijakan yang jelas diartikulasikan dan dikomunikasikan dan praktik korporasi yang mencerminkan tanggung jawab bisnis untuk beberapa barang sosial yang lebih luas.

Dari pendapat para ahli yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa respon sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan. Selain itu, perusahaan tidak hanya memikirkan atau terorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga harus memikirkan dampak sosial serta lingkungan yang bisa ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Dan berikut cara rumus dari indeks CSR:

$$\text{CSR Index} = \sum X_{ij}/n_j$$

2.1.5 Corporate governance

Corporate governance digambarkan memiliki legitimasi, akuntabilitas dan kompetensi dibidang kebijakan dan pemberian layanan secara bersamaan menghormati hukum dan hak asasi manusia (Dimasyqi & Faisal, 2021). *Corporate governance* dapat dikatakan sebagai pengelola dan pengendali dalam kegiatan kerja suatu perusahaan. Namun dapat dikatakan baik atau buruk, efektif atau tidak efektif tergantung dengan apa yang dimasukkan selama praktik dalam perusahaan dan juga berdasarkan pada karakteristik atau konsep nilai yang terkait. (Al-ahdal, Alsamhi, Tabash, & Farhan, 2020).

Menurut teori Nirmalasari & Sapari (2022) *corporate governance* merupakan sebuah kunci untuk mengurangi masalah keagenan dan biaya agensi. Setiap perusahaan dikelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemilik. Untuk mengelola perusahaan pemilik melakukan perekutan untuk membantu mengelola manajemen perusahaan. Tetapi sering kali antara pemilik dengan agen memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda yang dapat menimbulkan konflik keagenan. Oleh karena itu dengan mekanisme *corporate governance* dapat

mengurangi biaya agensi untuk mencapai tujuan kekayaan dan nilai perusahaan yang maksimum.

Perusahaan yang memiliki mekanisme tata kelola yang baik memiliki kemungkinan yang besar dapat dikelola secara efektif dan kecil kemungkinan manajer akan mengambil keuntungan pribadi, selain itu keberadaan anggota dewan komisaris independen merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena mereka bisa menjadi alat untuk memantau secara independen manajemen perusahaan (Moin, Guney& Kalak, 2020).

Menurut Duygun, Guney, & Moin (2018) ketika perusahaan dengan dewan yang besar akan memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik dan akan membayar dividen yang lebih tinggi karena dengan dewan yang lebih besar akan membawa lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik perusahaan juga perlu melakukan pemisahan antara CEO dengan direktur (Duygun et al., 2018)

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki arti yang penting dalam memonitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Institusional mempunyai investasi ekuitas yang cukup besar sehingga investor terdorong untuk mengawasi tindakan dan kinerja manajer lebih ketat. Kepemilikan institusional yaitu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang di ukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan (Hidayat et al., 2021). Aktivitas monitoring institusi mampu meningkatkan struktur pengelolaan perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Monitoring yang dilakukan institusi mampu mensubtitusi biaya keagenan, Sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

2.1.6.1 Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat menguji keandalan informasi.

2.1.6.2 Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Keberadaaan investor institusinal dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh manajer (Hidayat *et al.*, 2021).

Kepemilikan institusional adalah pemegang saham sebuah perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh suatu intitusi atau organisasi yang bisa dikukur dengan perbandingan jumlah kepemilikan institusional berbanding jumlah saham beredar. Berikut adalah rumus dari kepemilikan institusional:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusional}}{\text{jumlah Saham Beredar}}$$

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Agency theory menjelaskan bahwa timbulnya konflik antara principal sebagai pemegang saham dan agent sebagai manajer. Konflik tersebut timbul karena perbedaan kepentingan yang timbul diantara kedua belah pihak. Kepemilikan manajerial yaitu, besar kecilnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang berasal dari jumlah modal saham perusahaan yang dikelolanya. Kepemilikan saham oleh manajer yang rendah akan menimbulkan perilaku opportunistic manajer yang meningkat. Fungsi dari penerapan kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan adalah agar manajer dapat memaksimalkan kinerja dan meminimalkan terjadinya konflik keagenan. Oleh karena itu manajer akan bekerja dengan sangat hati-hati dan tidak akan melakukan tindakan kecurangan, karena jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan harga saham, maka manajer juga akan menanggung akibatnya, dan tidak lagi hanya pemegang saham yang menanggung kerugian, karena manajer masih memiliki saham didalam perusahaan (Anggraini & Fidiana, 2021). Kepemilikan manajerial dapat dikur dengan perbandingan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki pihak manajerial.

$$KM = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Majerial}}{\text{jumlah Saham Beredar}}$$

2.1.8 Dewan Komisaris Independen

Menurut Hidayat *et al.*, (2021), Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komisaris independen merupakan organ yang memiliki fungsi pengawasan atas pengelolaan manajer. Dewan komisaris independen sangat diperlukan dalam melaksanakan praktik good *corporate governance* sebagai jembatan antara pemegang saham dengan manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dilakukan dengan memberikan arahan dan monitoring terhadap pengelolaan manajer dan menjamin bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan strategi perusahaan. Adanya fungsi pengawasan yang tidak memihak salah satu organ menjadikan efisiensi dan daya saing perusahaan meningkat (Hidayat et al., 2021). Dewan komisaris merupakan faktor penting dari mekanisme tata kelola Perusahaan yang bisa diukur dengan jumlah dewan komisaris di setiap Perusahaan.

2.1.9 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tersebut yang bertugas untuk membantu dewan komisaris perusahaan untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip komite audit adalah mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. Komite audit sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* yang mampu mengurangi praktik manipulasi dan kecurangan dengan menjunjung prinsip *corporate governance*, transparansi, tanggung jawab, fairness, dan akuntabilitas yang pada prosesnya menghambat

praktek kecurangan dalam perusahaan (Widianingsih, 2018). Komite audit diukur dengan melihat berapa jumlah komite audit yang dimiliki sebuah perusahaan.

Keberadaan komite audit diatur melalui surat edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN) (Meindarto & Lukiaستuti, 2019). Jumlah komite audit minimal tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

- 2.1.9.1 Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
- 2.1.9.2 Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- 2.1.9.3 Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
- 2.1.9.4 Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	INDIKATOR	HASIL
1	Widya Kusuma Wardhani, Kartika Hendra Titisari, Suhendro (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Good <i>Corporate governance</i> terhadap Nilai Perusahaan	variabel independen: X1: ROA X2: DER X3: LN TOTAL ASSET X4: 1. jumlah dewan komisaris 2. jumlah komite audit variabel dependen: Y: PBV	1. profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 2. struktur modal, 3. ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 4. dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
2	Anggraini, R., &	Pengaruh Penerapan Good	variabel independen: X1: DER X2:	(H1) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial (KM)

	Fidiana, F (2021).	<i>Corporate governance Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan</i>	1. Kepemilikan Manajerial 2. Kepemilikan Institusional 3. Dewan Komisaris Independen 4. Komite Audit variabel dependen: Y: tobins Q	berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak, Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima, Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen (DeKI) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak, Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa komite audit (KA) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak, dan Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima.
3	Wiguna, R. A., & Yusuf, M. (2019).	Pengaruh profitabilitas dan good <i>corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan	variabel independen: X1: ROA X2: 1. Proporsi Dewan Komisaris 2. Rapat Dewan Komisaris 3. Proporsi Komite Audit 4. Rapat komite Audit 5. Kepemilikan Manajerial 6. Kepemilikan Institusional variabel dependen: Y: PBV	1 profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 2. proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 3. proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan kepemilikan manajerial 4. rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 5. rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

				6. kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
4	Sunardi, N. (2019).	Mekanisme good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan leverage sebagai variabel intervening pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2018.	<p>variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan Intitusional (X1) Kepemilikan Manajerial (X2) Komisaris Independen (X3) Komite Audit (X4) <p>variabel dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> PBV <p>variabel intervening:</p> <ul style="list-style-type: none"> DER 	<p>1. “Kepemilikan Intitusional (KEI) berpengaruh negatif tidak signifikan secara parsial terhadap Leverage (DER).</p> <p>2. Kepemilikan Manajerial (KEM) berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap Leverage (DER)</p> <p>3. Komisaris Independen (KOI) berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Leverage (DER)</p> <p>4. Komite Audit (KOA) berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Leverage (DER)</p> <p>5. KEI, KEM, KOI, KOA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Leverage (DER)</p> <p>6. Kepemilikan Intitusional (KEI) berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p>7. Kepemilikan Manajerial (KEM) berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap Nilai Perusahaan (PBV) dan</p> <p>8. Komisaris Independen (KOI) berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap Nilai Perusahaan (PBV)</p> <p>9. Komite Audit (KOA) berpengaruh positif</p>

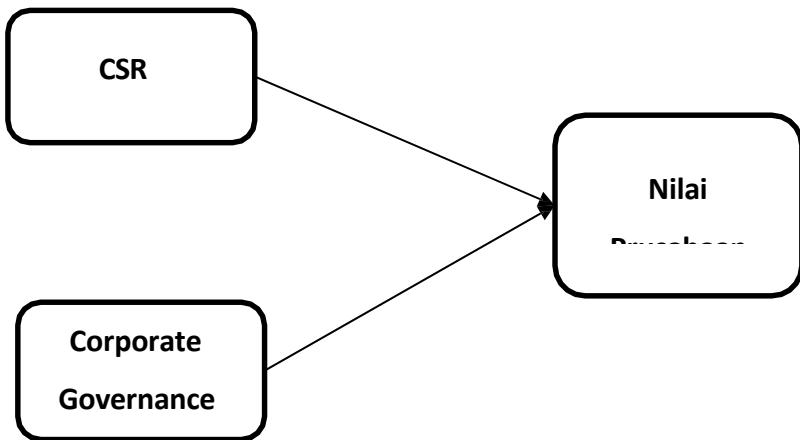
				signifikan secara parsial terhadap Nilai Perusahaan (PBV) 10. KEI, KEM, KOI, KOA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV)
5	Hidayat, T., Triwibowo, E., & Marpaung, N. V. (2021).	Pengaruh good <i>corporate governance</i> dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan	variabel independen: X1: Dewan Komisaris Independen (X1) Kepemilikan Institusional (X2) Komite Audit (X3) ROE (X4) variabel dependen: Y: PBV	1. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan 2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 3. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 4. ROE memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan nilai perusahaan 5. Secara simultan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan
6	Waleed M. Al-ahdal, Mohammed H. Alsamhi, Mosab I. Tabash, Najib H.S. Farhan (2020)	The impact of <i>corporate governance</i> on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation	variabel independen: 1. <i>Board Structure</i> 2. <i>Ownership Structure</i> 3. <i>Board Procedures Disclosure</i> 4. <i>Shareholder Rights</i> Variable dependen: Y1: <i>Firm Value</i> Y2: <i>Profitability</i>	a. Board Accountability (BA) dan Audit Committee (AC) tidak memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, diukur dengan ROE dan Tobin's Q. b. Transparency and Disclosure (TD) juga tidak memiliki dampak positif yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, diukur dengan Tobin's Q.

				b. c. Hasil kinerja keuangan dan praktik <i>corporate governance</i> di India lebih baik daripada di negara-negara anggota GCC.
7	Cut Sri Murinda, Islahuddin, Nuraini A (2019)	Firm Value: Does Corporate Governance and Research & Development Investment Matter?	variabel independen: 1. Board Accountability 2. Audit Committee 3. Transparency and Disclosure variabel dependen: 1. <i>firm value</i>	1. Tata kelola perusahaan yang baik tidak signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. 2. Investasi riset dan pengembangan (R&D) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. pengelolaan modal intelektual (IC) yang efisien memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 4. manajemen risiko perusahaan (ERM) juga memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
8	Richard Borghesi, Kiyoung Chang & Ying Li (2019)	<i>Firm value in commonly uncertain times: the divergent effects of corporate governance and CSR</i>	variabel independen: 1. <i>Economic uncertainty</i> 2. <i>Corporate governance mechanisms</i> 3. <i>Social responsibility investments</i> 4. <i>Board and executive flexibility</i> 5. <i>Adverse macroeconomic changes</i> 6. <i>CSR initiatives</i> 7. <i>Social capital</i> variabel dependen: 1. <i>firm value</i>	Fleksibilitas manajemen dan dewan direksi sangat penting saat tekanan lingkungan ekonomi meningkat. Kebijakan <i>corporate governance</i> yang membatasi hak pemegang saham selama periode ketidakpastian ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Investasi CSR memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan secara umum, tetapi pengaruhnya lebih kuat saat ketidakpastian kebijakan ekonomi tinggi.

				Investasi dalam kebijakan lingkungan dan karyawan dapat memiliki efek negatif pada nilai perusahaan secara keseluruhan, tetapi efek positif saat ketidakpastian kebijakan ekonomi tinggi.
9	Saparila Worokinasih, Muhammad Lutfi Zuhdi bin Mohamad Zaini (2020)	<i>The Mediating Role of Corporate social responsibility (CSR) Disclosure on Good Corporate governance (GCG) and Firm Value. A Technical Note</i>	1. variabel independen: <i>Corporate governance (CG)</i> 2. <i>Corporate social responsibility (CSR)</i> variabel dependen: <i>Firm Value</i>	Good <i>Corporate governance</i> (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan Good <i>Corporate governance</i> (GCG) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) Pengungkapan <i>Corporate social responsibility</i> (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan
10	Vera Apri Dina Safitri, Dhiona Ayu Nani (2021)	<i>Does Corporate governance and Eco-Efficiency Contribute to Firm Value? An Empirical Study in Indonesian State Owned Enterprises (SOE)</i>	variabel independen: 1. Good <i>Corporate governance</i> (GCG): -The presence of <i>corporate governance</i> mechanisms such as board independence, board size, CEO duality, etc. -Compliance with <i>corporate governance</i> regulations or standards 2. Eco-efficiency: -Ownership of an ISO 14001 environmental	1. Eco-efficiency (diukur dengan kepemilikan sertifikat manajemen lingkungan ISO 14001) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja keuangan perusahaan (ROA). 2. Kinerja keuangan perusahaan (ROA) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan nilai perusahaan. 3. Eco-efficiency tidak memiliki hubungan langsung dengan nilai perusahaan. 4. Good <i>corporate governance</i> tidak memiliki hubungan dengan kinerja keuangan perusahaan.

			management certificate 3. Firm's Financial Performance (ROA): Return on Assets (ROA) variabel dependen: share price	5. Good <i>corporate governance</i> tidak memiliki hubungan dengan nilai perusahaan.
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran